

PERNYATAAN PERS TAHUNAN
MENTERI LUAR NEGERI RI (PPTM) 2009

Jakarta, 6 Januari 2009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Konteks Internasional

1. Tahun 2008 merupakan tahun yang ditandai oleh perubahan yang sangat dinamis dalam lingkungan situasi global, regional dan bilateral, dalam lingkungan mana diplomasi Indonesia dioperasionalkan.
2. Dalam lingkungan global, dunia mengalami krisis multidimensional: *climate change*, krisis energi, krisis pangan, dan krisis finansial. Semuanya itu membawa dampak negatif langsung terhadap Indonesia, sekaligus menuntut bagaimana diplomasi Indonesia dapat berperan dalam upaya masyarakat internasional dalam mencari solusi dari berbagai krisis tersebut.
3. Perkembangan situasi perdamaian dan keamanan internasional, terutama dengan membaiknya situasi keamanan di Irak, stagnasi di Afghanistan dan munculnya sentra-sentra kekuatan baru, dan pemilihan umum di Amerika Serikat memperkuat gejala multilateralisme, yang juga membantu dalam mencari solusi masalah global. Hal ini membuka peluang bagi diplomasi Indonesia untuk berperan sebagai *bridge-builder* dan pembangun keseimbangan.
4. Dalam lingkungan regional, perubahan besar terjadi dalam kehidupan ASEAN dari suatu asosiasi yang agak longgar ke arah sebuah Komunitas ASEAN berdasarkan Piagam yang secara resmi mulai berlaku akhir tahun ini. Sebagai anggota ASEAN yang terbesar dan sebagai tuan rumah Sekretariat ASEAN, Indonesia dituntut untuk memainkan peranan yang tepat dalam proses transformasi itu. Proses integrasi ASEAN juga terkait dengan proses integrasi di kawasan, baik Asia Timur maupun Asia Pasifik. Hanya dengan ASEAN yang berhasil dalam guliran proses integrasinya maka ASEAN dapat memainkan peran sentral (*in the driving seat*) dalam proses integrasi kawasan yang tengah berlangsung dengan sangat dinamis. Menarik bahwa di tengah berbagai krisis yang dihadapi pada tataran global, tidak berhasilnya *Doha Development Agenda* dan karena itu kekhawatiran akan munculnya proteksionisme, dapat mempercepat guliran kerjasama dan integrasi kawasan di wilayah Asia Timur.
5. Diplomasi bilateral Indonesia pada tahun 2008 tidak terbebas dari konteks krisis multidimensi pada tingkat global dan dinamika integrasi kawasan. Bangunan-bangunan kemitraan strategis yang dikembangkan sejak beberapa tahun terakhir terus diperkuat dengan merampungkan *Plans of Action*, dan menambah kemitraan baru seperti dengan Afrika Selatan dan Brazil. Hubungan dengan negara tetangga juga terus diperkuat. Sangat bersejarah bahwa beban sejarah hubungan Indonesia–Timor Leste mengenai tuduhan pelanggaran HAM “menjelang dan segera setelah jajak pendapat” dapat diselesaikan melalui pendekatan *truth and friendship*, yang dengan begitu mengunci opsi penyelesaian melalui tribunal internasional.

Konteks Domestik

6. Memasuki tahun keempat masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu, Indonesia telah meraih kemajuan-kemajuan dalam mencapai program dan prioritas Kabinet. Proses demokratisasi terus menguat—dan bahkan demokrasi menunjang stabilitas politik dan keamanan—yang pada gilirannya memperkuat kredibilitas suara Indonesia mengenai demokrasi. Kemajuan dalam bidang HAM, termasuk penyelesaian tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur pada tahun 1999, melapangkan kiprah diplomasi Indonesia di bidang HAM.
7. Dalam bidang ekonomi, kinerja ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2008 cukup baik, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi awal sebesar 6,6%. Meski didera oleh krisis multidimensional, ketahanan ekonomi Indonesia cukup liat (hingga kuartal ke-3 masih sebesar 6,2%). Ketika dunia menghadapi krisis pangan, Indonesia mengalami swasembada beras, dan bahkan sedikit surplus. Suara Indonesia yang menyerukan dunia untuk menangani krisis pangan melalui Pertemuan Tingkat Tinggi cukup kredibel, karena Indonesia dapat menjadi bagian dari solusi.

Kiprah Politik Luar Negeri RI

8. Dalam konteks intermestik itu kiprah diplomasi Indonesia pada tahun 2008 terus menunjukkan penguatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral global. Mengakhiri keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB, selama dua tahun Indonesia berhasil menempatkan diri sebagai *bridge and consensus builder*, yang pada pihak lain juga tetap kukuh memegang prinsip.
9. Dalam masa keanggotaan Indonesia pada DK-PBB (2007-2008), Indonesia senantiasa memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip internasional yang bersifat fundamental, utamanya prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional (*national sovereignty and territorial integrity*). Indonesia konsisten menolak pelepasan bagian wilayah suatu negara secara sepihak seperti Kosovo dan Ossetia Selatan, sebagai suatu preseden yang dapat mengganggu stabilitas hubungan antar negara.
10. Selain itu, Indonesia juga secara tegas menolak kecenderungan pemanfaatan DK-PBB untuk melahirkan norma baru yang bertentangan dengan norma atau konvensi internasional yang berlaku, dalam hal ini UNCLOS, seperti dalam upaya penanganan masalah bajak laut di wilayah perairan Somalia.
11. Kiprah menonjol Indonesia di forum DK-PBB ditampilkan melalui sikap berdasarkan prinsip dalam pemungutsuaraan atas isu nuklir Iran. Indonesia senantiasa menyandarkan posisinya pada laporan IAEA, sebagai lembaga internasional yang berkompoten untuk menilai kepatuhan Iran dalam hal pengembangan energi nuklir. Ketika laporan IAEA memastikan bahwa Iran tidak cukup bekerja sama dan tidak transparan dalam pengembangan teknologi nuklirnya, Indonesia mendukung resolusi (Resolusi 1737/2007). Tetapi ketika laporan IAEA menampilkan Iran cukup bekerja sama dan lebih transparan, maka Indonesia memilih posisi *abstain* (1 dari 15 anggota) (Resolusi 1803/2008). Selain itu, Indonesia senantiasa mengedepankan cara penyelesaian yang mengutamakan dialog dan negosiasi, dan bukan dengan penggunaan kekerasan. Dalam proses perancangan resolusi lainnya pada bulan September 2008 (Resolusi 1835/2008), Indonesia telah berhasil mengamandemen

rancangan resolusi yang notabene sudah didukung oleh P-5 untuk memastikan resolusi juga mengedepankan upaya dialog.

12. Di penghujung tahun 2008 kita diingatkan kembali oleh situasi di Palestina yang merupakan *the mother of all conflicts*. Dalam proses penyelesaian konflik Palestina-Israel, menyusul partisipasi Indonesia pada *Annapolis Conference*, Indonesia juga diundang pada Konferensi Paris guna memberikan dukungan ekonomi bagi Palestina, dan atas inisiatif sendiri, Indonesia mengadakan *Asian-African Conference on Capacity Building for Palestine*. Keanggotaan Indonesia di DK-PBB juga ditutup dengan peran aktif kita dalam pembahasan mengenai situasi di Palestina, khususnya Jalur Gaza.
13. Menghadapi kegagalan DK-PBB dalam mewujudkan tanggung jawabnya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, seperti tercermin dalam dua sidang informal DK dalam seminggu terakhir, Indonesia melalui Biro Koordinasi GNB di New York sedang mengambil inisiatif agar Majelis Umum PBB mengadakan sidang darurat atas dasar pasal 51 Piagam PBB mengenai *Uniting for Peace Resolution*. Dan di Jenewa mendorong diadakannya sidang khusus Dewan HAM PBB. Disamping langkah-langkah diplomasi itu, sebagai wujud dukungan dan simpati, Pemerintah RI menyampaikan komitmennya untuk memberikan bantuan sebesar US\$ 1 juta dan obat-obatan.
14. Peran dan kepemimpinan Indonesia juga menonjol dalam isu *climate change*. Menyusul keberhasilan *Bali Conference* yang mengesahkan *Bali Roadmap*, Presiden Indonesia bersama dengan PM Polandia dan PM Denmark serta Sekjen PBB (sebagai anggota Troika+1) dari dekat ikut memandu proses lanjutannya untuk memastikan bahwa *Copenhagen Conference 2009* dapat menyepakati komitmen baru yang akan menggantikan *Kyoto Protocol* pada 2012. Dalam isu ekonomi, Indonesia, sebagai salah satu dari *emerging economies*, diundang pada *Hokkaido Summit 8+8*, dan kemudian *G-20 Summit*. Disamping itu, pada tahun 2008 Indonesia juga berpartisipasi aktif pada *OIC Summit*, *ASEM Summit*, dan *ASEAN+3 Summit*, serta *APEC Summit*. Ketiga pertemuan terakhir itu memfokuskan pembahasannya pada upaya mengatasi krisis ekonomi global.
15. Disamping itu, aktivitas diplomasi juga diarahkan untuk menerjemahkan berbagai kedekatan politik menjadi kemanfaatan ekonomi, khususnya membantu tugas-tugas promosi perdagangan, investasi, pariwisata dan tenaga kerja. Dalam kurun Januari-Oktober 2008, total nilai ekspor Indonesia tercatat mendekati USD 118,5 milyar, atau mengalami peningkatan sebesar 26,9% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi investasi penanaman modal asing berdasarkan ijin usaha pada periode Januari–November 2008 berjumlah 1.029 proyek, dengan nilai investasi sebesar US\$ 14,2 milyar. Hal ini diikuti pula oleh peningkatan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia sebanyak lebih dari 6,4 juta orang wisatawan pada tahun 2008, atau meningkat sebesar 16,8% dibandingkan 2007.
16. Melalui proses negosiasi, Indonesia berhasil meningkatkan atau membuka pasar tenaga kerja Indonesia, dimana tercatat lebih dari 700.000 orang pekerja Indonesia berhasil memperoleh pekerjaan di berbagai negara pada tahun 2008. Peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia ke luar juga diikuti oleh peningkatan kualitas, yang tercermin melalui permintaan tenaga terlatih (*skilled*) dan profesional yang terus meningkat.
17. Aktivitas diplomasi Indonesia pada tahun 2008 juga difokuskan pada upaya untuk mengatasi ancaman krisis finansial global. Melalui *Chiang Mai Initiative*, 13 negara di kawasan telah bersepakat untuk menghimpun dana talangan sebesar US\$ 80 milyar melalui *bilateral swap arrangement*. Menghadapi krisis finansial global itu, Indonesia

juga mendapatkan komitmen bantuan keuangan/pembangunan dari Jepang, Australia, dan dari China bagi pembangunan infrastruktur.

18. Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa kiprah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif relatif sangat lapang dijalankan, dan dengan hubungan baik yang kita majukan baik dengan negara berkembang maupun negara maju, pada tataran praksis kita menjalankan *multi-directions foreign policy*.
19. Politik luar negeri tidak hanya dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan nasional kita, melainkan juga memproyeksikan sistem nilai (*values*) pada tingkat nasional yang terus menguat, seperti demokrasi dan *good governance*, serta pemajuan dan perlindungan HAM. Walaupun kampanye anti korupsi masih relatif awal, namun sebagai *platform* politik komitmen kita di bidang ini menghilangkan kecanggungan kita untuk berperan aktif dalam diskursus internasional mengenai anti korupsi melalui *UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)*, yang diselenggarakan di Indonesia pada awal tahun 2008, serta menggalang kerjasama internasional ke arah pengembalian *asset* hasil korupsi (*asset recovery*).
20. Mengakhiri tahun 2008, Indonesia mengambil inisiatif untuk menempatkan pemajuan demokrasi dalam agenda kawasan Asia. Penyelenggaraan *Bali Democracy Forum* menjadi sangat bersejarah dan strategis, karena untuk pertama kalinya negara-negara di kawasan Asia mau dan mampu secara terbuka membicarakan upaya pemajuan demokrasi, sebagai proses yang akan berkelanjutan ke depan di bawah kepemimpinan Indonesia.
21. Kinerja pelaksanaan politik luar negeri selama tahun 2008 ditunjang oleh mesin diplomasi yang profesional sebagai hasil dari upaya reformasi internal (benah diri) Departemen Luar Negeri sejak 2001. Benah diri ini telah menumbuhkan budaya kerja baru (*institutional culture*) yang bersandar pada meritokrasi dan tiga tertib: tertib fisik; tertib waktu; dan tertib administrasi, termasuk administrasi keuangan. Departemen Luar Negeri patut berbangga diri bahwa buah dari reformasi yang dilakukan telah diakui dan diapresiasi. Khusus dalam konteks pelayanan warga (*citizen service*) dengan motto "kepedulian dan keberpihakan", KBRI Singapura dan KBRI Kuala Lumpur telah menerima penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima 2008 dari Presiden RI. Penghargaan Citra Pelayanan Prima 2008 juga diterima oleh Direktorat Pelayanan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia.

Proyeksi 2009

22. Kondisi keamanan internasional masih akan terus diwarnai oleh situasi konflik bersenjata. Konflik yang sudah lama, seperti Palestina, dan yang relatif baru, seperti Irak dan Afghanistan, disamping perang saudara di Kongo, Somalia, dan Darfur, yang kesemuanya belum ada tanda-tanda penyelesaiannya. Kehadiran pemerintahan baru di Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama telah memberikan harapan bagi penyelesaian konflik-konflik tersebut yang mengedepankan dialog. Memperhatikan bahwa dengan tertundanya dialog telah menyebabkan munculnya kekerasan di Palestina, dari perkembangan situasi sekarang ini di Jalur Gaza merupakan keharusan bagi pemerintahan baru di AS untuk memberikan prioritas bagi upaya pembaruan dialog dan negosiasi yang dirintis sejak *Annapolis Conference*.
23. Krisis multidimensional global, utamanya krisis keuangan, akan memerlukan penanganan hingga beberapa tahun ke depan, dan oleh karenanya harus terus

diantisipasi dampaknya terhadap Indonesia. Pada tahun 2009, krisis keuangan akan menjurus pada resesi atau bahkan depresi—yang dampaknya akan mulai dirasakan menggigit oleh masyarakat internasional pada pertengahan 2009.

24. Menyadari adanya potensi dampak serius dari krisis finansial—terutama kemungkinan melemahnya permintaan produk ekspor dari negara-negara maju, maka pada tahun 2009 salah satu prioritas aktivitas diplomasi Indonesia adalah pada upaya untuk meningkatkan, memperluas, atau mencari pasar-pasar non-tradisional baru seperti Rusia, negara-negara di Eropa Timur, Afrika dan Amerika Latin. Hal ini penting untuk memastikan kelanjutan ekspor Indonesia sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Prioritas lainnya dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan upaya untuk memperkuat kerjasama ekonomi, terutama kerjasama keuangan dan pembangunan.
25. Tahun 2009 juga merupakan tahun pemilihan umum yang berarti pula proses perubahan secara berkala mengenai pemangku jabatan dan kebijakan yang akan diambil untuk lima tahun mendatang. Pemilu yang berhasil akan memperkuat kehidupan demokrasi di Indonesia. Penguatan demokrasi tentu akan menambah bobot diplomasi dan citra Indonesia.
26. Hal lain yang akan menjadi prioritas diplomasi Indonesia pada tahun 2009 adalah mempersiapkan *groundworks* dan infrastruktur ASEAN setelah Piagam diberlakukan, antara lain: perampungan *Blueprints ASEAN Political and Security Community* dan *ASEAN Socio-Cultural Community* dengan rincian kegiatan dan timeline yang jelas; penyelesaian *Terms of Reference ASEAN Human Rights body*; disamping penguatan struktur dan staf Sekretariat ASEAN. KTT ASEAN yang semula dirancang untuk diadakan pada pertengahan Desember 2008 karena perkembangan situasi politik di Thailand telah tertunda, diharapkan dapat diselenggarakan kembali pada pertengahan kedua Februari 2009.

PERNYATAAN PERS TAHUNAN

MENTERI LUAR NEGERI RI (PPTM) 2009

Jakarta, 6 Januari 2009

I. PENDAHULUAN

1. Kiprah diplomasi Indonesia di tahun 2008 terus menunjukkan penguatan sejalan dengan peran yang dimainkan Indonesia dalam percaturan diplomasi internasional, baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral global. Dunia internasional mengapresiasi peran penting Indonesia dalam merespons berbagai isu global mulai dari isu *climate change*, penanganan korupsi, *food and energy security*, *financial crisis* hingga isu pemajuan demokrasi.

2. Pada awal tahun 2008, Indonesia mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah *UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)*. Mengakhiri tahun 2008, Indonesia mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan *Bali Democracy Forum*, sebagai forum antar pemerintah di Asia untuk menumbuhkembangkan diskursus mengenai demokrasi.
3. Diplomasi sering disebut sebagai perpanjangan dari situasi domestik. Kinerja diplomasi Indonesia di forum internasional tidaklah terlepas dari dukungan domestik yang semakin menyadari pengaruh dinamika hubungan internasional terhadap kondisi di dalam negeri, dan begitu pun sebaliknya. Dukungan domestik ini merupakan bentuk sinergi segenap komponen bangsa (*Indonesia Incorporated*) untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia, termasuk melalui praktik diplomasi.
4. Sepanjang tahun 2008, kiprah diplomasi Indonesia—dalam konteks bilateral, regional, internasional global—telah menunjukkan hasil-hasil yang positif terhadap peningkatan citra Republik Indonesia di mata dunia internasional maupun terhadap pencapaian program kerja dan prioritas Kabinet Indonesia Bersatu.

Konteks Domestik

5. Patut disyukuri bahwa selama tahun 2008, perkembangan situasi domestik relatif kondusif dalam mendukung kinerja diplomasi yang dilakukan Indonesia. Hal ini ditandai dengan peningkatan dan penguatan institusi-institusi demokrasi nasional yang menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik. Menyusul pelaksanaan pemilu tingkat nasional pada tahun 2004, dan penyelenggaraan pilkada di tingkat propinsi, kabupaten dan kotamadya di berbagai daerah, yang keseluruhannya berjumlah 450 pemilihan sejak tahun 2005, telah berlangsung dengan demokratis, aman dan damai. Kalaupun ada sengketa tentang hasil pilkada tersebut, secara tertib diterima penyelesaian melalui jalur pengadilan. Proses ini merefleksikan proses demokrasi yang semakin matang.
6. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya mengatasi ancaman dan bahaya terorisme telah membuahkan hasil yang positif. Indonesia terus berupaya melakukan penegakan hukum secara efektif terhadap para pelaku terorisme di dalam negeri. Sejak tiga tahun terakhir tidak ada lagi insiden serangan teroris di Indonesia. Disamping itu, Indonesia juga senantiasa terlibat aktif dalam upaya memperkuat berbagai kerjasama internasional dalam pemberantasan terorisme.
7. Pada tahun 2008, stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan keamanan Indonesia relatif terpelihara baik. Kondisi dalam negeri ini telah meningkatkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia, seperti pencabutan *travel warning* oleh Amerika Serikat setelah diterapkan selama 8 tahun. *Travel warning* lainnya yang masih tersisa pada kenyataannya tidak lagi efektif. Kondisi yang kondusif tersebut juga telah meningkatkan ketertarikan berbagai negara, termasuk dari kawasan Timur Tengah, untuk bekerja sama dan berinvestasi di Indonesia.
8. Isu separatisme dan ancaman terhadap keutuhan wilayah di ranah diplomasi jauh menyusut sejak dicapainya kesepakatan damai di Aceh dan pemberlakuan otonomi khusus di Aceh dan Papua. Kalaupun isu-isu separatisme muncul secara sporadis, misalnya di *Pacific Islands Forum*, secara efektif dapat dicegah berkat kerjasama kita dengan negara-negara kunci di PIF. Sementara di Eropa, kegiatan-kegiatan kelompok Papua merdeka lebih merupakan *nuisance* daripada *substance*, karena pada dasarnya tidak ada negara yang mendukung gerakan separatisme di Indonesia.

9. Di bidang ekonomi, krisis keuangan global dan fluktuasi harga minyak dunia yang pada puncaknya mencapai US\$ 156 per barrel berpotensi memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan pemerintah telah menaikkan harga BBM dan melakukan koreksi atas target-target pertumbuhan ekonomi yang harus dicapai. Sebagai ilustrasi, laju inflasi pada tahun 2008 ternyata melampaui 11%, sementara nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika sempat menembus Rp. 12.000 pada akhir November 2008. Namun demikian, di tengah kesulitan yang terjadi, ekonomi Indonesia pada tahun 2008 masih mampu tumbuh sebesar 6,1%, dan cadangan devisa mampu melampaui US\$ 60 miliar.

Konteks Internasional

10. Situasi global selama setahun terakhir terus memperlihatkan kecenderungan menguatnya pendekatan multilateralisme dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Meskipun keamanan internasional masih belum sepenuhnya tercapai dan keadaan ekonomi global masih belum stabil, namun secara umum situasi global terus mengarah pada suatu tatanan dunia yang lebih baik.
11. Sebagai satu-satunya badan utama PBB yang memiliki otoritas untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, DK-PBB dihadapkan pada berbagai tantangan dalam melaksanakan tanggung jawabnya, termasuk masih adanya perbedaan sikap negara anggota terhadap isu-isu tertentu. Meskipun sebagian besar waktunya difokuskan untuk mengatasi berbagai konflik di Afrika, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak persoalan Afrika yang belum dapat ditangani dengan baik. Hasil pembahasan di DK-PBB juga tidak selalu diikuti oleh langkah nyata yang positif di lapangan.
12. Pernyataan kemerdekaan sepihak oleh Kosovo pada 17 Februari 2008, telah memberikan tantangan baru bagi PBB. Meskipun beberapa negara Barat telah mendukung kemerdekaan Kosovo, namun Serbia sebagai negara induk menyerahkan permasalahan ini melalui *advisory opinion* ICJ dan berupaya mencari dukungan diplomatik kepada negara-negara anggota PBB lainnya. Sama halnya, dunia internasional juga dihadapkan pada masalah pemisahan diri dan deklarasi kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan dari Georgia.
13. Di tataran regional, selama tahun 2008, ASEAN terus melakukan berbagai langkah untuk mewujudkan sebuah Komunitas ASEAN. Pemberlakuan Piagam ASEAN pada 15 Desember 2008 merupakan momen bersejarah dalam proses integrasi ASEAN, dari sebuah asosiasi yang bersifat longgar menjadi organisasi yang memiliki *legal personality* dan berdasarkan aturan-aturan yang jelas.
14. Dalam konteks perdagangan internasional, perundingan Putaran Doha WTO masih belum mencapai titik temu. Hal ini diperburuk dengan terjadinya krisis keuangan global serta fluktuasi harga minyak dunia. Krisis tersebut telah mengakibatkan menurunnya kualitas hidup masyarakat secara umum, yang pada gilirannya akan mengganggu upaya-upaya global untuk mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya di negara-negara berkembang sesuai dengan target pencapaian MDGs.

II. RAIHAN DAN KILAS BALIK 2008

Diplomasi Bilateral

15. Di dalam kerangka diplomasi bilateral, Indonesia terus memperkuat kerjasama kemitraan strategis dengan negara-negara mitra utama, baik dalam lingkaran konsentris terdekat (di kawasan) maupun di luar kawasan. Indonesia secara aktif membahas dan menggali potensi kerjasama melalui berbagai forum seperti dalam kegiatan saling kunjung, pertemuan bilateral, regional dan multilateral antar pejabat tinggi negara serta pelaksanaan rutin Forum Konsultasi Bilateral (FKB), Sidang Komisi Bersama (SKB) dan kegiatan promosi TTI (*Trade, Tourism and Investment*). Selama tahun 2008, telah dilaksanakan sebanyak 18 kali forum Sidang Komisi Bersama (SKB), 7 diantaranya pada tingkat Menteri, dan 11 pada tingkat Pejabat Senior.
16. Dalam hubungan bilateral Indonesia - Malaysia, sejumlah terobosan telah dilakukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, khususnya mengenai isu perbatasan dan tenaga kerja yang ditandai dengan pencapaian berbagai kesepakatan di bidang ini. Menyangkut masalah perbatasan, pada bulan Juni 2008, kedua negara sepakat untuk menjajaki pembentukan suatu *Panel of Experts* yang akan memberikan pandangan hukum yang tidak mengikat sebagai masukan bagi kedua negara.
17. Kedua negara juga telah menyepakati pembentukan *Eminent Person Group* (EPG) di bidang non-politis, antara lain di bidang sosial dan budaya, dalam upaya peningkatan saling pemahaman di bidang-bidang tersebut. Dalam perkembangannya, EPG juga mencakup isu terkait dengan kerjasama promosi pariwisata, pelatihan usaha kecil dan menengah, isu TKI/WNI di Malaysia, penelitian budaya Islam dan pembentukan *halal food centre* serta kerjasama ekonomi lainnya.
18. Dalam hubungan bilateral Indonesia–Timor Leste, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) telah menyampaikan laporan akhir kepada pemimpin kedua negara pada tanggal 15 Juli 2008. Penyampaian laporan akhir tersebut juga akan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi (*Plan of Action*) guna pemajuan persahabatan dan rekonsiliasi lebih lanjut di antara kedua negara. Laporan akhir dan kinerja KKP telah mendapatkan apresiasi dari dunia internasional karena mampu menyelesaikan berbagai *residual issue* diantara kedua negara, khususnya tuduhan pelanggaran HAM “menjelang dan segera sesudah jajak pendapat” tahun 1999.
19. Pada tahun 2008, hubungan Indonesia – Jepang telah mencapai usia 50 tahun dan mencatat berbagai perkembangan dan hasil yang membanggakan. Nilai perdagangan bilateral kedua negara periode Januari – Agustus 2008 mencapai US\$ 29 milyar, atau meningkat sebesar 47,29% dibandingkan periode yang sama tahun 2007.
20. Kedua negara juga terus memperkuat kerjasama ekonomi, sebagaimana direfleksikan dari perjanjian kerjasama kemitraan ekonomi RI-Jepang (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement – IJEPA*) yang mulai diimplementasikan pada tahun 2008. Pengiriman tahap pertama perawat Indonesia sebanyak 200 orang ke Jepang dari 1.000 perawat yang dikirim selama dua tahun menandai dimulainya IJEPA. IJEPA juga tengah menjajaki kerjasama bilateral di bidang pengembangan usaha kecil dan menengah.
21. Hubungan bilateral dengan Republik Rakyat China (RRC) juga terus berkembang. Dalam pertemuan pemimpin kedua negara pada kesempatan KTT ASEM bulan Oktober 2008 lalu, RRC menyatakan komitmen untuk tetap melanjutkan semua proyek investasinya di Indonesia.

22. Kedua pihak juga sepakat untuk bekerjasama menghadapi dampak krisis keuangan global. RI dan RRC juga ingin segera menandatangani rencana aksi (*Plan of Action*) kerjasama kemitraan strategis yang telah disetujui pada tahun 2005 dengan target dan *timeline* yang jelas, antara lain meningkatkan volume perdagangan bilateral menjadi US\$ 30 milyar pada 2010. Memperhatikan bahwa pada tahun 2008 volume perdagangan bilateral Indonesia-China telah mencapai US\$ 27 milyar, diyakini bahwa target ini akan terlampaui.
23. Dengan Korea Selatan, Indonesia sepakat menindaklanjuti Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Strategis yang ditandatangani tahun 2006 dengan membentuk *Joint Task Force* di bidang ekonomi. Kedua negara juga sepakat untuk melipatgandakan volume perdagangan bilateral, nilai investasi dan jumlah wisatawan Korea yang berkunjung ke Indonesia pada akhir tahun 2012 serta menyetujui untuk meningkatkan peran sektor swasta dalam proses pembangunan infrastruktur di Indonesia.
24. Dalam tahun ini, Indonesia dengan Australia juga telah meratifikasi *Lombok Treaty* dan *exchange of notes* antar Menlu, 7 Februari 2008 di Perth, Australia untuk memberlakukan *treaty* dimaksud. Dengan diratifikasinya *treaty*, kedua negara memperkokoh kerjasama keamanan dan memperkuat komitmen untuk menghormati kedaulatan wilayah dengan tidak menjadi *staging point* bagi gerakan separatisme. Kedua negara juga aktif melakukan pembahasan dalam forum *Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF)* untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang dengan mengembangkan prinsip hubungan bertetangga yang baik (*goodneighborliness*). Dalam pertemuan IAMF ke-9 di Canberra, 10-12 November 2008, telah ditandatangani *Plan of Action* dari *Lombok Treaty*. *Lombok Treaty* sesungguhnya telah menjadi jangkar stabilitas hubungan bilateral Indonesia-Australia.
25. Pada lingkaran kepentingan di luar kawasan terdekat kita, hubungan kerjasama Indonesia dengan negara-negara di kawasan Afrika terus ditingkatkan, baik melalui mekanisme kerjasama dalam kerangka *New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP)* maupun dengan memperkuat hubungan kemitraan dengan sejumlah negara kunci di kawasan itu. Penandatanganan kerjasama kemitraan strategis antara Indonesia dan Afrika Selatan oleh kedua kepala negara, 17 Maret 2008, merupakan salah satu indikator semakin meningkatnya kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara di kawasan Afrika. Disayangkan bahwa penyusunan *Plan of Action* dari NAASP tertunda karena masalah-masalah di dalam Afrika sendiri. Sementara *Summit NAASP ke-2* yang semula akan diadakan di Afrika Selatan pada Februari 2009 juga tertunda karena faktor pergantian pemerintahan di Afrika Selatan.
26. Sedangkan dengan kawasan Timur Tengah, kunjungan Presiden ke Uni Emirat Arab dan Iran pada tanggal 10-16 Maret 2008, telah meningkatkan hubungan kedua pihak ke level yang baru. Selain memperkuat hubungan diplomatik, kunjungan tersebut juga ditujukan untuk menjajagi peluang kerjasama perdagangan dan investasi. Dalam kunjungan dimaksud, Indonesia menandatangani lima nota kesepahaman dengan Iran di bidang kerjasama pendidikan, pertanian, perminyakan, koperasi dan kamar dagang dan industri. Selain itu juga disepakati sejumlah kesepakatan antar pihak swasta kedua negara.
27. Hubungan Indonesia dengan negara di kawasan Eropa juga meningkat terlepas dari adanya pasang surut hubungan dengan Uni Eropa karena masih diberlakukannya larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia ke wilayah udara Uni Eropa sejak Juli 2007. Sebagai akibatnya, penandatanganan *Partnership and Cooperation Agreement (PCA)* Indonesia – UE, atas pilihan kita,

juga tertunda. Indonesia juga tetap menjajagi kerjasama untuk menghilangkan hambatan dagang non tarif (*non-tariff barrier*) dan *capacity building* untuk memenuhi standarisasi Uni Eropa.

28. Pada tahun ini, Indonesia telah menyepakati sejumlah kerjasama strategis dan teknis dengan negara di kawasan Eropa diantaranya adalah kerjasama dengan Rusia di bidang teknik militer yang disetujui pada Sidang Komisi Bersama kedua negara, 20-21 Agustus 2008. Indonesia juga telah mengadakan kerjasama dengan Hongaria untuk penanggulangan flu burung yang ditandai dengan penandatanganan PT. Biofarma dari Indonesia dan Omnivest dari Hongaria pada Juni 2008.
29. Dalam hubungan bilateral dengan AS, Indonesia dimasukkan sebagai *eligible country* untuk mendapatkan pendanaan yang lebih besar dalam kerangka program *Millennium Challenge Corporation* (MCC). Sementara itu, hubungan Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan Amerika juga mengalami peningkatan pesat. Kunjungan Presiden RI ke Meksiko, Brazil, dan Peru pada bulan November 2008 merupakan salah satu tonggak bersejarah. Kunjungan itu diharapkan menjadi pembuka bagi peluang pasar non tradisional bagi produk Indonesia.
30. Dalam kunjungan tersebut, Indonesia dan Brazil telah menandatangani Deklarasi Kemitraan Strategis dan 3 dokumen kerjasama di bidang pengentasan kemiskinan, energi dan pertambangan serta pertanian. Sedangkan dengan Meksiko, dalam peringatan 55 tahun hubungan diplomatik kedua negara, telah ditandatangani 4 MoU di bidang pelatihan diplomasi, pertanian, perdagangan dan energi.
31. Indonesia juga aktif dalam membina hubungan dengan negara-negara kepulauan di Pasifik yang menjadi anggota PIF. Indonesia aktif membantu peningkatan kapasitas dan kerjasama teknis di kawasan ini, diantaranya melalui pemberian beasiswa dan pelatihan. Penguatan kerjasama dengan kawasan tersebut juga dinilai penting baik dalam hubungan bilateral maupun dalam forum *Pacific Island Forum* (PIF) dan *Southwest Pacific Dialog* (SwPD) untuk memperkuat ketuhanan NKRI.
32. Untuk kepentingan penegakan hukum nasional, khususnya mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan ke yurisdiksi asing, Pemerintah Indonesia menyusun perjanjian *Mutual Legal Agreement* dengan beberapa negara secara bilateral sesuai dengan kepentingan nasional. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki perjanjian MLA dengan Australia, China, Korea Selatan, Hong Kong dan secara regional yaitu *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty*. Pemerintah Indonesia sedang dalam tahap perundingan pembentukan perjanjian MLA dengan Amerika Serikat, Belanda, dan Uni Emirat Arab.

Diplomasi Regional

33. Tahun 2008 merupakan momen bersejarah bagi masyarakat ASEAN karena pada tanggal 15 Desember 2008, Piagam ASEAN mulai diberlakukan. Peresmian pemberlakuan piagam pada *ASEAN Special Foreign Ministerial Meeting* yang diselenggarakan di Jakarta juga diikuti dengan diperdengarkannya *ASEAN Anthem* (lagu ASEAN) untuk pertama kalinya secara resmi.
34. Keberhasilan penyusunan Piagam ASEAN dan ratifikasinya oleh seluruh negara anggota merupakan suatu langkah awal dari suatu proyek besar untuk mentransformasikan ASEAN dari suatu asosiasi yang bersifat longgar menjadi organisasi yang memiliki *legal personality* dan berdasarkan aturan-aturan yang jelas. Disamping itu, Piagam ASEAN juga menegaskan bahwa ASEAN harus menjadi *people-oriented organization*.

35. Dalam proses penyusunan Piagam ASEAN, Indonesia telah menjadi penggagas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN dan turut memainkan peran penting dalam perumusan dua pilar lainnya. Selain itu, dalam upaya penyebarluasan pemahaman terhadap Piagam ASEAN, selama tahun 2008 Departemen Luar Negeri telah mengadakan berbagai kampanye publik (77 seminar dan *workshops*) kepada seluruh elemen masyarakat di hampir seluruh propinsi di Indonesia sehingga terbentuk pemahaman yang baik terhadap kerjasama ASEAN yang pada gilirannya akan merasa sebagai bagian dari kerjasama ASEAN.
36. Peran Indonesia dalam hal penanggulangan bencana alam di tingkat regional juga direfleksikan dalam penanggulangan bencana Siklon Nargis di Myanmar. Dalam hubungan ini, Indonesia berinisiatif untuk diselenggarakannya Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN di Singapura (19 Mei 2008). Atas desakan Indonesia, pertemuan tersebut menyepakati pembentukan mekanisme koordinasi yang dipimpin oleh ASEAN guna memfasilitasi penyaluran dan penggunaan bantuan internasional kepada Myanmar secara lebih efektif. Pendekatan ini merupakan jalan keluar dari kebuntuan komunikasi antara Myanmar dengan masyarakat internasional dan karena itu mendapatkan apresiasi yang sangat positif dari berbagai kalangan masyarakat internasional.
37. Selain itu, tetap dalam kaitan penanggulangan bencana alam, ASEAN telah membentuk *Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre /Pusat Bantuan Kemanusiaan ASEAN)* dan menyusun *ASEAN Standby Arrangement and Standard Operating Procedures (ASEAN SASOP)*. Indonesia telah mendapatkan *endorsement* sebagai tuan rumah lokasi *AHA Centre*.
38. Terkait upaya solusi isu krisis pangan pada tingkat kawasan, Indonesia turut aktif berperan melalui pengusulan penetapan langkah-langkah untuk merespon dampak krisis dimaksud. Dalam hubungan ini, ASEAN telah menyusun skema strategis dan komprehensif untuk memperkuat ketahanan pangan regional yang disebut *ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework*. ASEAN adalah *rice basket*-nya Asia, karena itu kerjasama yang efektif mengenai masalah ini dapat menjadikan ASEAN sebagai bagian dari solusi krisis pangan dunia.
39. Sementara itu, terkait krisis finansial global, negara-negara anggota APEC telah menyelenggarakan KTT APEC di Lima, Peru, tanggal 22-23 November 2008, dimana sebuah deklarasi khusus telah dihasilkan, yaitu *APEC Leaders' Statement on the Global Economy* sebagai respon terhadap krisis finansial global dan konklusi *WTO Doha Development Agenda (DDA)*.
40. Para Pemimpin APEC sepakat bahwa krisis perekonomian dunia yang terjadi saat ini tidak dapat diatasi dengan upaya perbaikan dan penanggulangan di sisi finansial dan perbankan saja, namun juga perlu dibarengi dengan upaya penguatan di sektor ekonomi riil dan perdagangan.
41. Hal ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan Indonesia tentang perlunya reformasi arsitektur keuangan dunia dan terobosan dalam proses perundingan DDA yang dapat diterima semua pihak. Selain itu dalam KTT di Peru, Indonesia juga menyatakan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah APEC pada tahun 2013.
42. Isu perubahan iklim juga turut menjadi perhatian pada pertemuan KTT ASEM ke-7 di Beijing pada bulan Oktober 2008. Presiden RI secara khusus diminta untuk menyampaikan pandangannya terhadap isu tersebut, mengingat Indonesia dipandang berhasil pada saat penyelenggaraan UNFCCC di Bali pada bulan Desember 2007.

43. KTT tersebut menghasilkan Deklarasi Beijing *on Sustainable Development* dan *Chair's Statement* yang memuat prinsip-prinsip perubahan iklim yang sejalan dengan UNFCCC dan kebijakan Pemerintah RI, seperti *common and differentiated responsibilities and respective capabilities, developed countries take the lead, transfer teknologi dan bantuan pendanaan*.
44. Kontribusi Indonesia dalam isu Palestina antara lain tercermin dalam gagasan Indonesia mengenai peningkatan kapasitas warga Palestina dalam kerangka kerjasama Asia Afrika (NAASP). Pada bulan Juli 2008 Indonesia telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika untuk Pembangunan Kapasitas Palestina. Pada konferensi yang dihadiri oleh 55 negara, Indonesia sebagai *coordinating unit* kawasan Asia berkomitmen untuk memberikan bantuan pembangunan kapasitas kepada sebanyak 1.000 orang untuk periode lima tahun ke depan (2008-2013). Sebagai salah satu perwujudan komitmen tersebut, pada tahun 2008, Indonesia telah memberikan pelatihan mengenai *micro-financing, business incubator, women SMEs, democratization and good governance*. Selain itu, Indonesia telah memberikan pelatihan diplomasi kepada para diplomat Palestina di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Deplu.
45. Melalui *Forum for East Asia - Latin American Cooperation (FEALAC)*, Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kegiatan penting, diantaranya Pertemuan ke-5 Kelompok Kerja Bidang Politik, Kebudayaan dan Pendidikan FEALAC *back-to-back* dengan FEALAC *Conference on Ecotourism* di Bali pada bulan Juli 2008.
46. Pertemuan yang membahas berbagai program kerja politik, kebudayaan dan pendidikan ini menjadi sarana strategis upaya peningkatan kerjasama konkrit FEALAC. Di samping itu, FEALAC *Journalist Visit Program 2008* telah diselenggarakan untuk yang ketiga kalinya dengan menghadirkan tujuh wartawan dari negara-negara Amerika Latin, yaitu Argentina, Brazil, Chile, Ecuador, Republik Dominika, Peru, dan Costa Rica ke Indonesia.

Diplomasi Multilateral - Global

47. Keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK-PBB untuk kurun waktu dua tahun sejak 1 Januari 2007 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Mengakhiri keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB, selama dua tahun Indonesia berhasil menempatkan diri sebagai *bridge and consensus builder*, yang pada pihak lain juga tetap kukuh memegang prinsip.
48. Keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK-PBB merupakan amanah Konstitusi. Keanggotaan tersebut dengan sendirinya memberikan keleluasaan bagi Indonesia untuk turut secara lebih aktif dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta dengan sendirinya dalam rangka mengamankan kepentingan nasional Indonesia. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota DK-PBB merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia atas partisipasi dan kontribusi aktif kita di dunia internasional. Keanggotaan tersebut sekaligus merupakan refleksi pengakuan terhadap berbagai kemajuan yang dicapai di dalam negeri, termasuk pembangunan, proses demokratisasi, serta pemajuan dan perlindungan nilai-nilai hak asasi manusia. Sebuah kepercayaan yang dengan sendirinya disertai pula dengan tanggung jawab dan adanya harapan terhadap Indonesia.
49. Dalam periode dua tahun keanggotaan Indonesia tersebut, sebagian besar perhatian DK-PBB telah dialokasikan untuk mengatasi konflik di benua Afrika, yaitu Burundi, Chad, Congo, Cote d'Ivoire, situasi antara Ethiopia dan Eritrea, kawasan

Great Lakes, Liberia, Republik Afrika Tengah, Rwanda, Sahara Barat, Sierra Leone, Somalia, dan Sudan. Untuk kawasan lain, isu yang dibahas mencakup situasi di Irak, Cyprus, Nepal, Timur Tengah (termasuk masalah Palestina), Bosnia dan Herzegovina, Georgia, Haiti, Afghanistan, dan Timor Leste. Untuk isu tematik, DK-PBB telah membahas permasalahan tentang Pengadilan Internasional di wilayah bekas Yugoslavia, terorisme, Pengadilan Kriminal Internasional di wilayah Rwanda, non-proliferasi (isu nuklir Iran), serta *women and peace and security*.

50. Dalam kedudukan sebagai Presiden DK-PBB periode bulan Nopember 2007, Indonesia telah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan perdebatan terbuka dengan tema "*The role of regional and subregional organizations in the maintenance of international peace and security.*" Topik pembahasan adalah mengenai kapasitas organisasi-organisasi regional dan sub-regional untuk menyumbang pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan regional dan internasional, serta mengidentifikasi dan mengembangkan modalitas bagi peningkatan kontribusinya kepada DK-PBB dalam menjalankan mandatnya. Dalam perdebatan tersebut Sekretaris Jenderal PBB, 15 anggota DK-PBB, 6 wakil organisasi regional dan sub-regional, serta 18 negara anggota PBB lainnya telah menyampaikan pernyataan. Sebuah pemilihan topik yang sesuai dengan kecenderungan dan perkembangan di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara, dan telah mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan.
51. Sebagai hasil dari perdebatan tersebut, rancangan Pernyataan Presiden DK-PBB yang disusun dan diusulkan oleh Indonesia serta dibahas sebelumnya oleh seluruh anggota DK-PBB telah disahkan dan saya bacakan selaku Presiden DK-PBB. Inti pernyataan tersebut berisikan tentang: penegasan kembali tanggung jawab DK-PBB bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional; ketetapan untuk mendorong peningkatan kerjasama dengan organisasi regional dan sub-regional; serta pentingnya dialog serta pemajuan nilai-nilai bersama di kawasan bagi penyelesaian perselisihan dan isu-isu lain yang terkait dengan perdamaian dan keamanan internasional.
52. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota tidak tetap DK-PBB, Indonesia selalu berpegang pada prinsip politik luar negeri secara konsekuen dan teguh. Indonesia juga berpedoman pada prinsip dan tujuan PBB, penghormatan atas hukum internasional dan berbagai konvensi internasional yang telah berlaku dan disepakati secara universal, serta pemajuan dialog dalam penyelesaian berbagai konflik. Indonesia secara konsisten telah mengambil sikap dan posisi konstruktif terhadap berbagai isu yang dibahas berdasarkan prinsip dan pedoman tersebut dan tidak mengikuti arus, apalagi tunduk terhadap 'tekanan' dari negara lain. Indonesia juga selalu konsisten mendorong perlunya DK yang bersatu guna menghadapi berbagai tantangan permasalahan keamanan internasional.
53. Secara singkat Indonesia telah berhasil melaksanakan kewajibannya sebagai anggota tidak tetap DK-PBB dengan baik. Indonesia juga dinilai berhasil mengembangkan peran sebagai *a moderating voice*, dan *a consensus and bridge builder* antar sesama anggota DK PBB dalam upaya menghasilkan suatu solusi bagi isu-isu keamanan dan perdamaian Internasional. Secara konsisten Indonesia dalam menjaga mandat DK- PBB agar selalu sesuai dengan Piagam PBB dan tidak merambah ke isu-isu lain yang ditangani oleh organ utama PBB lainnya, seperti Majelis Umum dan ECOSOC. Sikap dan peran tersebut mendapatkan apresiasi tinggi baik dari negara-negara anggota tetap maupun tidak tetap DK-PBB, serta anggota PBB pada umumnya. Apresiasi ini juga terlihat dari harapan banyak negara terhadap Indonesia agar lebih kerap duduk sebagai anggota tidak tetap DK-PBB.

54. Berakhirnya keanggotaan Indonesia di DK-PBB tidak berarti berkurangnya perhatian kita terhadap isu-isu yang menjadi topik pembahasan di DK-PBB. Indonesia akan tetap bekerjasama dengan anggota DK PBB untuk secara bersama mencari solusi atas berbagai persoalan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
55. Indonesia juga akan terus menggalang kerjasama melalui forum Organisasi Konperensi Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok untuk mempengaruhi pembahasan dan arah penyelesaian berbagai konflik internasional yang belum terselesaikan, utamanya perdamaian di Timur Tengah dan perwujudan Palestina merdeka.
56. Dalam kerangka pemajuan isu HAM, tahun 2008 merupakan tahun kedua keanggotaan Indonesia di dewan HAM (2007 – 2010). Pada tahun 2008, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang telah menjalani pengkajian mengenai Laporan Nasional Indonesia di bawah mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR). Indonesia telah menunjukkan kerjasama dan keterbukaannya atas mekanisme HAM PBB melalui kesediaannya menjadi salah satu negara paling pertama yang menjalani proses tinjauan ulang di bawah mekanisme UPR.
57. Masalah tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur “menjelang dan segera setelah” jajak pendapat pada tahun 1999 merupakan masalah yang menempati agenda penting di Komisi HAM PBB (sekarang *Human Rights Council*) sejak tahun 1999. Setelah 10 tahun bayang-bayang masalah ini diselesaikan pada tribunal internasional telah diakhiri dengan penerimaan laporan hasil kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) oleh Pemerintah Indonesia dan Timor Leste, serta komitmen bersama untuk menindaklanjuti rekomendasi KKP. Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk bersama Pemerintah Timor Leste mulai merancang *Plan of Action* dari rekomendasi KKP. Pengertian yang baik dan dukungan dari banyak negara, termasuk DK-PBB pada sidangnya tanggal 16 Agustus 2008, telah menutup satu babakan sejarah yang kelam dalam hubungan Indonesia-Timor Leste.
58. Apresiasi terhadap kinerja diplomasi Indonesia di forum internasional juga direfleksikan dari kepercayaan dunia kepada Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan UNCAC (28 Januari – 1 Februari 2008). Agenda pertemuan difokuskan pada lima bidang, yakni *Review implementation; Consultation on prevention; Technical assistance; Bribery of officials of public international organizations*; dan *Asset recovery*. Konferensi dimaksud memiliki kedudukan yang sangat strategis bagi Indonesia, dalam mendukung program pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Terkait dengan *Stolen Asset Recovery* (StAR) inisiatif, hal ini diharapkan akan semakin memperkuat kapasitas dan kerjasama diantara lembaga penegak hukum dalam upaya pengembalian aset hasil tindakan korupsi.
59. Myanmar merupakan isu penting di kawasan Asia Tenggara karena tingginya sorotan masyarakat internasional terhadap situasi di negara tersebut terutama isu demokratisasi. Indonesia telah berperan aktif dalam membantu penyelesaian masalah ini dengan membentuk *Focused Group on Myanmar* yang melibatkan Indonesia, RRC, dan India. Gagasan yang bertujuan untuk melibatkan negara tetangga dalam menyelesaikan masalah Myanmar terhambat karena India belakangan mengundurkan diri.
60. Sepanjang tahun 2008, isu nuklir Iran masih menjadi perhatian masyarakat internasional, khususnya di DK-PBB. Iran masih dianggap belum mematuhi ketentuan-ketentuan dalam resolusi 1737 (2006) dan 1747 (2007) sehingga pada

tahun 2008 DK PBB kembali mengeluarkan dua resolusi baru, yaitu resolusi 1803 dan 1835.

61. Terkait dengan resolusi 1803, Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota DK-PBB yang mengambil sikap abstain dengan alasan bahwa sesuai laporan IAEA, Iran telah memperlihatkan kerjasama yang positif dengan IAEA dalam menyelesaikan "*outstanding issues*" terkait program nuklir Iran dan belum terlihat adanya keperluan pada saat ini untuk mengeluarkan resolusi baru yang memberikan sanksi tambahan kepada Iran.
62. Terkait dengan isu senjata nuklir, Indonesia menolak segala bentuk uji coba senjata nuklir dan sarana pengantarnya karena bertentangan dengan prinsip *non-proliferasi* yang diatur dalam Traktat NPT dan Traktat CTBT. Lebih jauh, Indonesia secara konsisten mendukung penyelesaian isu nuklir Korut melalui cara-cara damai dalam kerangka pertemuan *Six-Party Talks* untuk mencapai denuklirisasi di Semenanjung Korea dan normalisasi hubungan kedua Korea. Disayangkan bahwa implementasi kesepakatan denuklirisasi mengalami kemacetan.
63. Sejalan dengan perannya dalam mewujudkan perdamaian dunia, pada tahun ini, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam rangkaian "Oslo Process" yang bermuara dengan disepakatinya *Convention on Cluster Munitions (CCM)*, menyusul penggunaan jenis senjata ini pada konflik di Lebanon Selatan tahun 2006. Indonesia telah menandatangani Konvensi ini, yang tidak hanya mengurangi dampak kemanusiaan dari penggunaan CM, tetapi juga mendorong perlucutan senjata global atas senjata yang tidak berperikemanusiaan (*inhumane weapons*).
64. Komitmen Indonesia bagi upaya pemeliharaan perdamaian dunia juga direfleksikan melalui pengiriman personil TNI dan Polri dalam berbagai Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) PBB. Pada tahun 2008 Indonesia mengirimkan Kontingen Garuda XXIII-C ke Lebanon yang tergabung dalam kontingen UNIFIL dan satuan polisi (144 personil) ke Sudan yang tergabung dalam misi UNMIS dan *hybrid UN – African Union peacekeeping force* di Darfur dibawah UNAMID. Terdapat permintaan, baik dari PBB maupun dari *host country*, agar Indonesia menambah jumlah pasukan perdamaianya di Lebanon Selatan, Darfur dan Kongo.
65. Dalam upaya pencapaian perlucutan senjata, sebagai negara pihak pada Konvensi Senjata Kimia (KSK), Indonesia telah melaksanakan sepenuhnya ketentuan pasal VII dari KSK dengan diberlakukannya UU No. 9 Tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia pada tanggal 10 Maret 2008. UU tersebut juga telah memandatkan Pemerintah Indonesia untuk membentuk Otoritas Nasional Konvensi Senjata Kimia (KSK) yang antara lain bertugas sebagai penghubung antara Indonesia dengan *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)* dan negara-negara pihak lainnya.
66. Dalam isu kejahatan terorganisir lintas negara (*transnational organized crime*), Indonesia berhasil memasukkan *isu illegal logging* sebagai bagian dari kejahatan terorganisir lintas negara pada forum PBB. Resolusi ECOSOC 2008/25 mengenai "*International cooperation in preventing and combating illicit international trafficking in forest product, including timber, wildlife and other forest biological resources*" secara resmi mengakui *illegal logging* sebagai kejahatan transnasional. Saat ini Indonesia tengah mengupayakan memasukkan *isu illegal, unregulated, and unreported (IUU) fishing* sebagai salah satu *new emerging form of transnational crime* agar dapat diakui oleh PBB.
67. Peran aktif Indonesia bagi upaya pencapaian *Millennium Development Goals (MDGs)*, khususnya dalam kaitan dengan pengurangan angka kematian bayi/balita

dan kematian ibu (*maternal mortality*), juga dicerminkan dari kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan ke-2 *Sherpa Group of the Network of Global Leader (Sherpa Group)* pada tanggal 26-27 Juni 2008 di Jakarta. Indonesia memiliki kepentingan besar terhadap pelaksanaan pertemuan tersebut, mengingat angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi di bandingkan negara-negara di kawasan.

68. Pada tahun 2008, dunia juga dihadapkan pada krisis keuangan global menyusul krisis energi dan krisis pangan yang disebabkan oleh ketimpangan antara permintaan dan penawaran, disamping adanya spekulasi pasar. Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik dalam menghadapi berbagai krisis global tersebut. Ketahanan ini juga merupakan asset dalam memperkuat berbagai inisiatif diplomasi kita, karena kita dapat menjadi bagian dari solusi. Oleh karenanya, di tengah kesulitan ekonomi yang terjadi, kiprah diplomasi Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Hal ini tercermin dari keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu negara kunci dalam pertemuan internasional bagi pembahasan isu krisis pangan dan energi dalam kerangka G-8 di Hokkaido, Jepang pada bulan Juli 2008 dan isu krisis keuangan dalam kerangka G-20 di Washington DC pada bulan November 2008.
69. Selain itu, Indonesia bersama dengan UNESCAP pada tanggal 9-10 Desember 2008 juga menyelenggarakan pertemuan *High Level Regional Policy Dialogue on the Food-Fuel Crisis and Climate Change: Reshaping the Development Agenda* di Bali. Pertemuan menghasilkan "*Bali Outcome Document*" yang berisi rekomendasi kunci kebijakan dan strategi dalam menghadapi krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim. Hasil ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi negara dalam mengembangkan kebijakan nasionalnya dan bersama-sama mengembangkan kebijakan regional.
70. Dalam rangka mendorong keberhasilan negosiasi perubahan iklim pada *Conference of the Parties (COP)* ke-14 UNFCCC di Poznan tahun 2008 dan COP ke-15 UNFCCC tahun 2009 di Copenhagen, pada tanggal 12 September dan 24 Oktober 2008 telah diselenggarakan *video conference* antara *Troika Leaders* (Presiden RI, Presiden Polandia dan PM Denmark) dan Sekjen PBB. Sebagai tuan rumah dari *Bali Conference* yang menghasilkan *Bali Roadmap* secara konsensus, Indonesia bersama anggota Troika lainnya diharapkan untuk terus memandu proses negosiasi sehingga menghasilkan kerangka komitmen baru pada akhir 2009, yang akan menggantikan *Kyoto Protocol* pada tahun 2012.
71. Pengesahan Piagam Baru OKI pada kesempatan KTT OKI di Dakkar, Senegal, pada bulan Februari 2008, telah menjadi langkah awal dari proses yang lebih besar dalam mereformasi dan mentransformasi OKI menjadi sebuah organisasi lebih efektif dalam meyuarkan kepentingan umat Muslim di seluruh dunia. Indonesia pada melalui Menteri Luar Negeri telah ikut melakukan penandatanganan Piagam Baru OKI tersebut pada KTM OKI ke-35 di Uganda, pada Juni 2008.
72. Keberhasilan kepemimpinan Indonesia yang lain dicapai melalui masa jabatan sebagai Ketua D-8 periode 2006-2008. Keberhasilan utama yang dicapai antara lain mengenai perumusan *Roadmap* D-8 sebagai pedoman kerjasama D-8, penyelesaian pembahasan *Rules of Origin* dan *Operational Certification Procedure* sebagai kelengkapan *Preferential Agreement* D-8 serta terpilihnya Dr. Dipo Alam (Indonesia) sebagai Sekretaris Jenderal D-8 yang pertama di bawah pengaturan baru ini terhitung mulai Januari 2009 hingga tahun 2012.
73. Sebagai sumbangsih pada masalah pelestarian dan perlindungan warisan budaya, Indonesia telah menyelenggarakan *International Conference of World Heritage*

Cities of Euro-Asia pada bulan Oktober 2008 di Solo. Pertemuan itu menghasilkan *Solo Declaration on the Safeguarding and Protection of Heritage* yang menekankan pentingnya penjagaan dan perlindungan warisan budaya benda dan takbenda dalam pembangunan kota yang berkelanjutan.

Diplomasi Publik

74. Di tahun 2008, diplomasi publik yang dilakukan Indonesia terus memperoleh dukungan dan apresiasi publik yang semakin luas. Berbagai upaya dan inisiatif diplomasi publik terus ditingkatkan, baik untuk merangkul berbagai komponen masyarakat di dalam negeri sebagai bagian pelaksanaan politik luar negeri, maupun untuk membentuk dan meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang demokratis, berpenduduk mayoritas muslim moderat, dan masyarakat modern.
75. Mengakhiri tahun 2008, Indonesia telah mengambil inisiatif untuk menempatkan pemajuan demokrasi dalam agenda perbincangan antar pemerintah di kawasan Asia. Penyelenggaraan *Bali Democracy Forum* menjadi sangat bersejarah dan strategis, karena untuk pertama kalinya negara-negara di kawasan Asia mau dan mampu secara terbuka membicarakan upaya pemajuan demokrasi, sebagai proses yang akan berkelanjutan ke depan di bawah kepemimpinan Indonesia.
76. *Bali Democracy Forum* (BDF) dihadiri oleh 32 negara (4 tingkat Kepala Negara dan pemerintahan yaitu Indonesia, Australia, Brunei Darusalam dan Timor Leste, 17 Menteri dan sisanya pada tingkat Pejabat Senior). Pertemuan tersebut merupakan inisiatif untuk kerjasama kawasan ke arah pengembangan demokrasi, melalui *sharing of experiences and best practices*, yang mendorong tumbuh kuatnya demokrasi dari dalam (*home grown*). Melalui kegiatan BDF, terdapat keinginan untuk menumbuhkan momentum bagi upaya konsolidasi demokrasi di Indonesia.
77. BDF akan dijadikan pertemuan tahunan tingkat Menteri Luar Negeri di kawasan Asia untuk membahas peluang kerjasama internasional di bidang demokrasi dan pembangunan politik. BDF juga akan menyelenggarakan sejumlah kegiatan regular pada tingkat teknis seperti *workshop*, penelitian dan seminar yang akan dijalankan oleh *Institute for Peace and Democracy*, sebuah lembaga yang didirikan oleh Departemen Luar Negeri dengan menggandeng Universitas Udayana, Bali.
78. Pada tanggal 7-8 Mei 2008, Indonesia kembali menjadi tuan rumah Global Inter-Media Dialogue (GIMD III) di Bali, dengan mengangkat tema *Ethical Journalism in Extreme Conditions: the Challenge of Diversity*. Pelaksanaan program dialog lintas media ini mempunyai peran penting untuk mendekatkan jarak dan meningkatkan pemahaman lintas budaya dan agama guna menghindari pemicu konflik yang dapat memperbesar jarak di antara masyarakat dunia.
79. Hasil pertemuan GIMD III di Bali tersebut tidak lagi berupa diskusi yang bersifat global, namun merupakan tindak lanjut hasil-hasil dialog GIMD sebelumnya dalam bentuk yang lebih konkrit seperti *regional school of journalism*, *workshop jurnalistik*, *bilateral* dan *regional inter-media dialogue*. Proses GIMD merupakan respons yang konstruktif terhadap perdebatan yang steril di bawah judul kemerdekaan berpendapat (dalam konteks penerbitan kartun Nabi Muhammad) yang hanya menambah ketidak-salingpengertian antar budaya, agama, dan peradaban.
80. Sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan-pertemuan dialog lintas agama sebelumnya, Indonesia juga telah memprakarsai penyelenggaraan serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada tingkat *grassroots*

dengan mengangkat tema-tema yang terkait dengan masalah keagamaan, kepemudaan dan budaya seperti *Asia Pacific Inter-Faith Youth Camp on Climate Change* di Surabaya pada bulan April 2008, dan *Indonesia-Lebanon Inter-Faith Conference on Nation-Building* di Beirut, bulan November 2008.

81. Berbagai upaya diplomasi publik lainnya terus dilakukan untuk mengkomunikasikan kebijakan politik luar negeri kepada masyarakat, antara lain melalui *Annual Lectures* di berbagai perguruan tinggi, *Foreign Policy Breakfast*, website Deplu, *Presidential Friends of Indonesia*, Duta Belia, Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia, dan *Journalist Visit Program*.
82. Upaya diplomasi publik juga tetap digiatkan untuk memfasilitasi kerjasama luar negeri oleh pemerintah-pemerintah daerah melalui program pemberdayaan kapasitas daerah yang pada tahun 2008 telah diselenggarakan antara lain di Propinsi Banten, Propinsi Kalimantan Barat dan Propinsi Papua Barat. Hal ini dilakukan dalam bentuk pelatihan yang diberikan oleh Direktorat terkait di Deplu kepada pemegang kepentingan di daerah tersebut.

Benah Diri (Internal Reform) Departemen Luar Negeri

83. Pada tahun 2008, Departemen Luar Negeri terus secara konsisten melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi departemen dan perwakilan, serta pembenahan profesi diplomat mulai dari proses rekrutmen hingga *post-career planning*. Benah diri terus digalakkan guna mewujudkan Departemen Luar Negeri sebagai institusi pemerintah yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.
84. Di dalam proses restrukturisasi organisasi departemen, jabatan Wakil Menteri Luar Negeri dibentuk untuk meningkatkan kemampuan Deplu dalam menjalankan tugas diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Deplu juga terus melakukan pembenahan mesin diplomasinya melalui peningkatan kualitas SDM dan terus mengedepankan budaya kerja berbasis meritokrasi, dan perilaku yang mengacu pada 3 Tertib (Fisik, Waktu dan Administrasi).
85. Guna meningkatkan kualitas SDM, Deplu juga terus mendorong para diplomatnya untuk mengikuti program pendidikan formal yang lebih tinggi dan pendidikan berjenjang. Hingga tahun 2008 tercatat sebanyak 686 Diplomat yang memiliki gelar setingkat Master serta 20 Diplomat yang memiliki gelar Doktor. Selain itu, upaya peningkatan profesionalisme para diplomat juga dilakukan melalui pengembangan kerjasama pendidikan dan pelatihan dalam kerangka kerjasama bilateral (Clingendael, Belanda) regional (ASEAN+3) dan multilateral (ILO Jakarta, UNCTAD, UNEP, WIPO, UNHCR dan KT HAM).
86. Selain itu, untuk memperkuat peran Perwakilan RI dalam mendukung kinerja diplomasi Indonesia di negara akreditasi, pada tanggal 2-5 April 2008 diselenggarakan Rapat Kerja (Raker) Departemen Luar Negeri dengan Kepala Perwakilan RI dengan tema "Peningkatan Peran Diplomasi dalam Menyukseskan dan Menuntaskan Program Kabinet Indonesia Bersatu".

87. Pertemuan ini menghasilkan beberapa rekomendasi antara lain pemanfaatan potensi peluang bagi peningkatan pembangunan dan kemakmuran serta berperan aktif dalam pencapaian kepentingan melalui pendekatan yang tepat kepada mitra. Selain itu, juga telah diselenggarakan Pertemuan Konsul Kehormatan RI yang pertama kalinya pada tanggal 20 – 30 Oktober 2008 yang diikuti oleh 40 Konsul Kehormatan dari 34 negara.
88. Keberhasilan proses benah diri Deplu dan pengembangan budaya kerja (*institutional culture*) yang baik juga terefleksikan dengan diraihnya Piala Citra Pelayanan Prima 2008 oleh KBRI Singapura dan KBRI Kuala Lumpur, dan Piagam Penghargaan Citra Pelayanan Prima oleh Direktorat Perlindungan WNI dan BHI dari Presiden RI. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas pelayanan warga yang berkualitas (cepat, mudah, murah, dan ramah).
89. Untuk terus memperkuat fungsi perlindungan WNI dan BHI, Deplu terus melakukan perluasan pembukaan Sistem Pelayanan Warga (*Citizen Service*) di 9 Perwakilan RI di luar negeri yaitu: KBRI Abu Dhabi, KBRI Riyadh, KBRI Kuwait, KJRI Johor Baru, KJRI Hong Kong, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Jeddah, KJRI Dubai dan KBRI Kuala Lumpur menuju pada pelayanan 3 jam atau kurang. Sebelumnya sistem ini telah diuji-cobakan di 6 Perwakilan RI, yakni KBRI Singapura, KBRI Seoul, KBRI Bandar Seri Begawan, KBRI Amman, KBRI Doha dan KBRI Damaskus.
90. Dalam kaitannya dengan penertiban Barang Milik Negara (BMN), Deplu bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan, secara berkesinambungan tengah melakukan penertiban BMN pada seluruh Satuan Kerja (Satker). Khusus dalam upaya memperbaiki opini *disclaimer* dari BPK, telah dilakukan beberapa langkah tindak lanjut agar Laporan Keuangan Departemen Luar Negeri Tahun Anggaran 2008 mendapat kenaikan opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian.
91. Di bidang pengawasan, Deplu juga terus memaksimalkan fungsi pengawasan melekat dengan memperkuat Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern dan mengembangkan *institutional culture* yang baru, untuk menyesuaikan dengan misi pengawasan yang lebih dinamis, cepat dan tidak ragu-ragu untuk menyelamatkan uang negara.
92. Kerjasama dan koordinasi juga dilakukan dengan Aparat Pengawasan Eksternal, Departemen Teknis serta instansi-instansi penegak hukum di Indonesia. Hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah ini selalu ditindaklanjuti oleh Departemen Luar Negeri secara tuntas. Upaya pengawasan dan penertiban guna mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak.
93. Sementara itu, guna mengoptimalkan pelaksanaan kinerja dan anggaran yang berbasis kinerja (*performance based budget*), Departemen Luar Negeri terus melakukan upaya pengawasan dan pengendalian yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Selain pelaporan secara triwulanan, pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kinerja dilaporkan dalam suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Departemen Luar Negeri setiap tahunnya.
94. Pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga terus dikembangkan dengan penambahan kapasitas bandwidth saluran internet dan sistem TIK yang lebih terpadu (*Integrated ICT System*), yang meliputi dukungan untuk pengembangan situs web Deplu menjadi satu portal terpadu, penerapan sistem komunikasi data, suara dan video terpadu (*Unified Communication*) dan pengamanan hubungan telekomunikasi.

95. Pemanfaatan teknologi tersebut juga ditujukan untuk mendukung berfungsinya *e-government* di lingkungan Departemen Luar Negeri, sebagaimana telah diimplementasi dalam bentuk *e-procurement* dan proses rekrutmen secara *on-line*.

III. PROYEKSI 2009

Lingkungan Domestik

96. Dalam kurun waktu 3 bulan ke depan, Indonesia akan menyelenggarakan pemilu legislatif yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan presiden secara langsung. Untuk mensukseskan kegiatan tersebut, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri juga turut berperan aktif dalam proses persiapan dan penyelenggaraan Pemilu, termasuk pembentukan PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri). Secara umum, diperkirakan bahwa pelaksanaan Pemilu akan terselenggara dengan baik dan akan semakin memperkuat kredibilitas diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam mendorong pemajuan demokrasi.
97. Dampak krisis finansial global masih akan dirasakan pada tahun 2009, sementara ancaman krisis pangan pengaruhnya relatif kecil bila dikaitkan dengan proyeksi produksi pangan Indonesia yang diharapkan akan terus meningkat pada tahun 2009. Diperkirakan Indonesia akan mencapai surplus pangan di tahun depan, sehingga berpotensi untuk melakukan ekspor dan membantu memperkuat suplai pangan dunia.
98. Terkait dengan usaha untuk menanggulangi dampak dari krisis global, diplomasi Indonesia akan lebih proaktif dalam mencari peluang pasar baru bagi produk Indonesia, terhadap pasar non-tradisional utamanya di Afrika, Timur Tengah, Eropa Tengah dan Timur serta Amerika Selatan dan Karibia. Dengan kata lain Deplu akan terus berupaya memperkuat mesin diplomasi Indonesia, termasuk dengan memperkuat fungsi perwakilan RI sebagai ujung tombak diplomasi guna mencari peluang ekonomi di negara akreditasi masing-masing.

Lingkungan Internasional

99. Hubungan bilateral RI dengan negara-negara mitra pada tahun 2009 diharapkan akan semakin kuat, baik di bidang politik, pertahanan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup maupun sosial budaya. Kerjasama kemitraan strategis yang telah berlangsung selama ini diproyeksikan akan terus meningkat dan membuahkan hasil-hasil konkrit bagi peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang.
100. Terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden AS telah menunjukkan kemampuan demokrasi dalam pembaruan kebijakan. Diperkirakan kebijakan luar negeri AS akan berubah ke arah yang lebih mengedepankan dialog—bukan penggunaan kekuatan—dan *soft power*. Pemerintahan yang baru diharapkan akan meninggalkan unilateralisme, namun mengedepankan multilateralisme. Pada pihak lain, kita perlu realistis bahwa janji untuk mengedepankan nilai-nilai ideal seringkali dikesampingkan oleh realitas politik dan kepentingan AS sebagai kekuatan global.
101. Proses integrasi ASEAN setelah pemberlakuan Piagam akan memerlukan persiapan *groundworks* dan infrastruktur ASEAN, antara lain: perampungan *Blueprints ASEAN Political and Security Community* dan *ASEAN Socio-Cultural Community* dengan

rincian kegiatan dan timeline yang jelas; penyelesaian *Terms of Reference ASEAN Human Rights body*; disamping penguatan struktur dan staf Sekretariat ASEAN.

102. KTT ASEAN yang semula dirancang untuk diadakan pada pertengahan Desember 2008 karena perkembangan situasi politik di Thailand telah tertunda, diharapkan dapat diselenggarakan kembali pada pertengahan kedua Februari 2009. Dalam kesempatan KTT tersebut akan ditandatangani *Chiang Mai Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community/CMDRAC (2009-2015)* menggantikan *Vientiane Plan of Action* yang menjadikan ASEAN sebagai “kawasan yang damai, demokratis, terbuka, adil, transparan, toleran, inklusif, harmonis dengan pasar dan basis produksi tunggal, serta berorientasi kepada masyarakat.”
103. Di bidang perdagangan, guliran proses perundingan *Free Trade Areas (FTAs)* dengan negara peserta KTT Asia Timur (*East Asia Summit*) seperti ASEAN-Jepang/China/Korea Selatan/India/Australia/Selandia Baru dan Uni Eropa masih akan terus berlangsung dan akan menjadi suatu “*building blocks*” yang akan menjelma menjadi perdagangan bebas Asia Timur yang potensinya luar biasa.
104. Sedangkan dalam fora internasional, kegagalan perundingan tingkat Menteri terbatas pada putaran Doha bulan Juli 2008 merupakan momentum bagi Indonesia untuk mengkaji ulang secara lebih rinci mengenai peluang-peluang yang ada serta prinsip-prinsip yang tetap harus dipertahankan dalam proses perundingan selanjutnya. Sementara itu, Indonesia akan turut kontribusi dalam upaya global untuk penanggulangan krisis keuangan dan ekonomi dunia dalam pertemuan KTT Pasar Keuangan dan Ekonomi Dunia (PKED) – G-20 pada bulan April 2009 di Inggris.
105. Pada tahun 2009, Indonesia akan menjadi tuan rumah beberapa konferensi internasional seperti *World Ocean Conference* di Manado bulan Mei 2009 dan *World Islamic Economic Forum (WIEF)* ke-5 di Jakarta, tanggal 1-4 Maret 2009. Hal ini merupakan konsistensi dari bentuk kepercayaan dunia internasional terhadap kinerja diplomasi Indonesia dan juga refleksi dari kondusifnya situasi keamanan di dalam negeri.

Penguatan Proses Benah Diri

106. Penyempurnaan struktur organisasi dan peningkatan kualitas SDM akan tetap dilanjutkan untuk mengoptimalkan kinerja Deplu dalam mendukung peran diplomasi Indonesia. Dalam kaitan dengan pelayanan publik, pada tahun 2009 akan dilakukan standarisasi ISO 9001:2000 tentang Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI yang akan diawali pada Sistem Rekrutmen Pegawai serta Pelayanan Publik pada KBRI Singapura dan KBRI Kuala Lumpur.
107. Deplu juga mempersiapkan implementasi *e-Passport* bagi pengurusan paspor diplomatik dan dinas yang akan diberlakukan secara internasional pada tahun 2010.

IV. PENUTUP

108. Perlu ditegaskan kembali bahwa kiprah dan raihan diplomasi pada tahun 2008 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda, prioritas dan program kerja kerja Kabinet Indonesia Bersatu, yang pada tahun 2009 ini akan menyelesaikan

tugasnya. Departemen Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI di luar negeri siap untuk terus bekerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa, terutama di tengah situasi krisis keuangan global yang dampaknya masih akan dirasakan pada tahun 2009.

109. Ditengah aktivitas diplomasi yang padat tersebut, keluarga besar Departmen Luar Negeri harus kehilangan seorang tokoh diplomasi RI, Bapak Ali Alatas yang wafat pada tanggal 11 Desember 2008. Sumbangsih beliau dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia melalui diplomasi sangat penting bagi bangsa kita. Kontribusi beliau dalam mewujudkan perdamaian dunia telah diakui dan dihargai oleh komunitas internasional. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak atas ungkapan belasungkawa, simpati dan solidaritas yang telah diberikan kepada Departemen Luar Negeri dan Keluarga Almarhum.
110. Terakhir, mewakili seluruh jajaran Departemen Luar Negeri, Menteri Luar Negeri juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya baik kepada media massa nasional yang terbit di Jakarta maupun di daerah, yang tiada hentinya memberikan dukungan kepada Departemen Luar Negeri dalam menyebarkan informasi dan pembelajaran kepada masyarakat serta berkontribusi dalam kiprah diplomasi Indonesia.
111. Seperti tahun-tahun yang lalu, tahun ini Departemen Luar Negeri kembali akan memberikan penghargaan *Adam Malik Award* kepada rekan-rekan media massa. Selamat atas keberhasilan me raih penghargaan ini.